

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Sebuah penelitian harus didukung oleh penggunaan konsep dan proposisi untuk menjelaskan fenomena secara ilmiah. Menurut Fany (2017), konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Sedangkan proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep. Selanjutnya Moleong (2002: 34-35) menjelaskan jika:

“teori ini dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diaamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang sedang diamati”.

Teori digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami objek yang diteliti dan menganalisis data yang terkumpul untuk dapat menemukan makna, keunikan, mengkategorisasikan dan mengkonstruksi hubungan antar kategori (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini, teori dan konsep yang akan digunakan adalah teori keamanan, arsitektur keamanan maritim, *domain maritime awareness*, *maritime situation awareness*, *game theory*, kepemimpinan regional, stabilitas kawasan, dan *good maritime governance*.

2.1.1 Teori Keamanan

Dalam penelitiannya mengenai “*New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century*”, Buzan (1991) mengatakan bahwa keamanan dianggap sebagai teknik *survival* dan keinginan untuk terbebas dari segala macam ancaman. Dalam bukunya yang lain, Buzan menambahkan bahwa keamanan adalah fenomena relasional. Karena keamanan bersifat

relasional, seseorang tidak dapat memahami keamanan nasional negara mana pun tanpa memahami pola interdependensi keamanan internasional di mana ia tertanam. Negara yang tidak mempertimbangkan keamanan regionalnya, maka keamanan nasional mereka akan terganggu dan bahkan mengalami bencana (Stone, 2009).

Di sisi lain, konsep keamanan maritim dipersepsikan secara berbeda oleh beberapa tokoh. Kadang-kadang isu ini bahkan dianggap sebagai topik yang besar dan samar (Feldt et al., 2013). Natalie Klein menjelaskan bahwa keamanan maritim merupakan upaya perlindungan terhadap wilayah baik darat maupun laut, sarana, ekonomi, lingkungan laut dan masyarakat dari tindakan kejahatan yang terjadi di wilayah lautan (Klein, 2011). Keamanan maritim akan dikonstruksikan sesuai dengan potensi ancaman yang mengintai di negara atau kawasan tertentu.

Dalam kasus LCS, sengketa telah menimbulkan pergolakan ancaman di kawasan (Bekkevold & Till, 2016: 221). Padahal keamanan maritim akan berjalan dengan baik jika dilandasi oleh ketidak hadirannya konflik antar regulasi legal (*legal framework*), seperti regulasi yang diatur internasional, regional dan lokal, bahkan domestik (Feldt et al., 2013). Untuk proses penanganannya, Keliat (2009) mengatakan jika isu keamanan maritim pada umumnya bersifat transnasional, sehingga perlu kerjasama dari negara-negara pantai dalam penanganannya.

2.1.2 Arsitektur Keamanan Maritim

Tow & Taylor (2010: 95) dalam analisisnya mengenai “*What is Asian security architecture?*”, menawarkan definisi awal untuk dipertimbangkan. Menurutnya arsitektur keamanan adalah struktur keamanan yang menyeluruh, koheren, dan komprehensif untuk area geografis tertentu. Arsitektur bisa menjadi instrumen yang layak untuk membantu negara dalam mengelola keamanan regional berdasarkan karakteristik wilayahnya. Secara historis, arsitektur berkembang pasca Perang Dingin berakhir.

Konsep ini menggambarkan dengan jelas upaya Pentagon untuk memperluas misi dan cakupan kekuasaan geografisnya, hal ini juga digunakan untuk mengooptasi negara-negara anggota baru dari Eropa Timur, Eropa Barat, dan negara-negara pecahan Uni Soviet (Tow & Taylor, 2010: 97). Dalam berbagai tinjauan literatur, kebanyakan sarjana terkemuka Asia enggan menggunakan alegori arsitektur untuk didefinisikan secara formal, sehingga beberapa dari mereka lebih senang untuk mengutarakan pemahaman implisit mengenai 'arsitektur'.

Dalam konteks *multilateral issue*, arsitektur digunakan untuk menyusun keamanan kooperatif dan hanya bisa tercapai ketika semua aktor berupaya untuk meredakan konflik dan ketegangan regional (Tapia, 2021). Hal ini terjadi karena arsitektur keamanan memungkinkan dialog yang tulus antar aktor regional, serta mengatasi sentimen negatif dan kecurigaan (Tapia, 2021: 2). Arsitektur keamanan juga biasanya terfokus pada upaya-upaya untuk menekan persaingan intra-regional dan intervensi asing (Khatibzadeh, 2020), dan membahas mengenai institusi regional yang fokus di masalah ekonomi, keamanan, perdagangan, dan kelembagaan kooperatif lainnya.

Menurut John Mearsheimer dalam penelitiannya mengenai "Defining a New Security Architecture for Europe That Brings Russia in from the Cold", arsitektur keamanan bisa mempromosikan perdamaian di kawasan, menurunkan perang dingin, dan mengembalikan status quo (Mearsheimer, 2016). Dalam praktiknya, arsitektur akan membahas sesuai dengan region geografis yang jelas (Mely Caballero-Anthony, 2007). Maka dari itu, sebelum melakukan penelitian para sarjana harus fokus pada kawasan geografis mana yang akan dia bahas di dalam penelitiannya.

Menurut Bueger (2019), dalam penelitiannya mengenai "What is the right security architecture for the Western Indian Ocean?", sebuah arsitektur pertama-tama perlu dibangun di atas pengakuan akan potensi dari wilayah yang disengketakan dan manfaat yang bisa diharapkan dari

kerjasama multilateral di wilayah itu. Arsitektur keamanan maritim harus didasarkan pada tiga variabel kunci, yakni *knowing the sea* (mengetahui laut), *governing the sea* (mengatur laut), dan *policing the sea* (mengawasi laut) (Bueger, 2019: 3). Arsitektur selalu berbicara mengenai multilateralisme dan lembaga-lembaga multilateral yang ‘dianggap’ bertanggung jawab terhadap keamanan dan stabilitas regional di wilayah tersebut (Indeo, 2014).

Dalam tesis ini, penggunaan konsep dan teori arsitektur berguna untuk memahami struktur kepenulisan dan tujuan akhir dari proses penelitian ini. Karena terjadi di domain maritim, maka arsitektur keamanan yang disusun harus disesuaikan dalam ranah maritim, apalagi jika mengingat bahwa literatur Arsitektur Keamanan Maritim belum sebanyak konsep induknya. Pembentukan arsitektur keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan harus mempertimbangkan semua aktor di kawasan karena sifatnya yang transnasional.

2.1.3 Maritime Domain Awareness

Dalam tesis ini, penggunaan konsep MDA dilakukan untuk mendukung arsitektur keamanan maritim pada dimensi *knowing the sea*. Sejalan dengan analisis dalam penelitiannya mengenai “What is the right security architecture for the Western Indian Ocean?” yang menyarankan bahwa arsitektur keamanan maritim harus disokong dengan kesadaran domain maritim, termasuk di tingkat regional dan local Bueger (2019). Untuk mencapai kesadaran yang sama terkait isu LCS, kita harus membangun MDA yang kuat untuk merespons setiap pergerakan yang berpotensi mendorong instabilitas maritim di kawasan.

Information sharing dan MDA bisa menjadi salah alternatif yang bisa diambil untuk ‘bertahan’ di tengah situasi ambigu atau mandala *gray zone*. Ini adalah salah satu prasyarat untuk koordinasi dan kerja sama antara berbagai badan keamanan maritim dan sering dipahami sebagai “*key enabler*” (Bueger, 2015). Proses berbagi informasi sudah seharusnya

dijadikan sebagai barang publik untuk mencapai *sea control* yang dikendalikan langsung oleh negara-negara maritim secara kooperatif (I. F. J. Lim, 2007). Dalam hal ini, Lim berpendapat jika MDA akan membutuhkan *info-sharing*, *info-fusion*, dan pemahaman yang masuk akal untuk memberi isyarat intelijen yang responsif dan koordinasi operasional.

Menurut Department of Homeland Security USA (2005), dalam MDA Pusat Intelijen Maritim Nasional akan menjadi titik sentral konektivitas untuk memadukan, menganalisis, dan menyebarkan informasi dan intelijen untuk kesadaran situasi bersama melintasi batas-batas klasifikasi. Data saja tidak cukup. Data harus dikumpulkan, digabungkan, dianalisis, dan sebaiknya dengan bantuan integrasi data komputer dan algoritma analisis untuk membantu menangani aliran data yang luas dan berbeda, sehingga pengambil keputusan operasional dapat mengantisipasi ancaman dan mengambil inisiatif untuk mengalahkannya. Secara singkat, MDA terdiri dari data dan implementasi yang dilakukan berdasarkan data tersebut.

Pemahaman yang didapat dari MDA diharapkan bisa mendorong arsitektur keamanan maritim yang ideal di wilayah sengketa, sehingga keamanan dan perdamaian bisa tercapai dengan baik di kawasan Indo-Pasifik. MDA adalah cara yang paling efektif untuk melihat manuver ancaman baik secara *regular*, *irregular*, *disruptive*, maupun *catastrophics*. Salah satu aspek terpenting MDA adalah Maritime Situation Awareness. MSA adalah *situation awareness* yang diaplikasikan di domain maritime, kadangkala disepadankan dengan MDA (Bueger, 2015).

Model *situation awareness* ini bisa dibandingkan dengan sistem pengambilan keputusan dari perspektif keamanan nasional (Sebrina, 2020: 6). Sistem pengambilan keputusan dari perspektif keamanan nasional akan berguna untuk mempertimbangkan konteks eksternal dan internal dari manajemen pertahanan sebagai sistem sosial yang saling berinteraksi (Fluri dan Tagarev: 2009). Peningkatan *maritim situation*

awareness menjadi salah alternatif yang bisa diambil untuk 'bertahan' di tengah situasi ambigu atau mandala *gray zone*.

MSA mencakup bagaimana orang menggabungkan, menafsirkan, mengumpulkan dan menyimpan informasi, kemudian lebihnya lagi memahami dan memperhatikan informasi yang diperoleh untuk selanjutnya diintegrasikan sebagai informasi penentu yang relevan terhadap suatu tujuan (Endsley & Garland, 2008). NATO memberikan argumennya mengenai *Maritime Situation Awareness* sebagai pemahaman tentang peristiwa, kegiatan dan keadaan militer dan non-militer yang terkait dengan lingkungan maritim.

Lingkungan maritim tersebut diantaranya adalah laut, teluk, estuari, saluran air, wilayah pesisir dan pelabuhan (Dias et al., 2018). Keamanan maritim harus dicapai melalui proses *information sharing* (Bueger, 2015: 158). Senada dengan aplikasi MSA, Le Mière (2014: 9) menyarankan agar operasi keamanan maritim dilakukan melalui latihan gabungan. Selain memperkuat ikatan antar negara, juga meyakinkan saingan potensial tentang sifat angkatan laut mereka yang tidak mengancam.

Pemahaman yang didapat dari proses analisis konflik dan manajemen MSA diharapkan bisa mendorong arsitektur keamanan maritim yang ideal di wilayah sengketa, sehingga keamanan dan perdamaian bisa tercapai dengan baik di kawasan Indo-Pasifik. MDA dan MSA adalah cara yang paling efektif untuk melihat manuver ancaman baik secara *regular, ireegular, distructive*, maupun *catastrophics*.

2.1.4 Game Theory

Menurut (Myerson, 2002: 1) *game theory* dapat didefinisikan sebagai studi model matematik dari konflik dan kerjasama di antara pengambil keputusan yang rasional. *Game Theory* pada awalnya dipopulerkan untuk mengatasi permasalahan ekonomi (Situmorang, 2015). Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, teori ini kemudian bisa dirancang untuk memahami strategi pencegahan konflik, dan menyokong

decision making dalam interaksi sosial (Brams, 2001). Beberapa literatur menyebut *game theory* dapat digunakan untuk kondisi ekstrim dimana masing-masing pihak mempertimbangkan risikonya dengan membangun *pay off* mulai dari yang terbaik sampai yang terburuk.

Teori ini sempat diimplementasikan selama puncak perang dingin tahun 1950-an untuk menangkal potensi perang nuklir antara Amerika dan Uni Soviet, krisis Berlin (1961), juga dibahas Le Mière (2014) untuk menjembatani permasalahan diplomasi maritim antar negara. Teori ini adalah *cooperative game* yang memberi kesempatan kepada pemain untuk mengetahui strategi terbaik yang dimiliki lawan. Dalam kasus LCS, peneliti akan menggunakan teori permainan untuk melihat potensi pergerakan RRC dan Amerika sebagai dua *superpower states* yang strateginya dianggap bisa menstimulus respons dari negara lain di dunia.

Menurut Mustaqim (2013:17), dalam praktiknya *game theory* mengikuti kaidah-kaidah, yakni:

- a. jumlah pemain terbatas (minimal dua pemain), dan mereka memiliki pilihan untuk mengambil tindakan yang rasional dan independen;
 - b. strategi yang akan diambil terbatas;
 - c. upah (hasil keputusan yang didapat oleh masing-masing pemain) diprosikan dalam bilangan positif, negatif, dan nol.
- a. pemain pertama disebut *pemain baris*, dan pemain yang kedua *pemain kolom*.

Elemen-elemen pentingnya adalah *player*, *information* (US dan RRC memahami betul apa yang akan dilakukan oleh pemain lawan atau *cooperative game*), *payoff*, dan *strategy*.

Dalam kasus RRC VS Amerika, kita bisa menerapkan model *game of chicken* dan *deadlock*. Hal ini dilandasi oleh asumsi bahwa Amerika dan RRC adalah dua aktor yang tidak mau mengalah. RRC dengan kebangkitan kekuatan lautnya yang baru, dan Amerika dengan hegemoni dan momen unipolarnya yang sudah bertahan sekian abad. Dalam kondisi

seperti itu, keduanya akan terjebak *chicken dilemma*, yakni kondisi ketika tidak ada pemain yang ingin menyerah. Dengan kekuatan yang seimbang, kedua pemain akan saling menghampiri, dan pemain yang mundur lebih dulu akan dijuluki sebagai *chicken* (Stanford, 2018) atau 'ayam sayur'.

Dalam tesis ini, jenis analisis *game theory* lain yang akan digunakan adalah tipe *static prisoners' dilemma*, *dynamic bluff game*, dan *dynamic easy win game*. Tipe dilemma tahanan akan memungkinkan Cina dan Amerika berhadapan-hadapan secara personal. Sedangkan *dynamic bluff game* dan *dynamic easy win game* akan memasukan unsur pendukung lain (seperti QUAD, AUKUS, dan NATO) sebagai elemen yang akan mempengaruhi pola gerak permainan. Tipe game ini dipilih karena dirasa sesuai dengan kondisi empiris konflik maritim di LCS pada saat ini.

Sebagai lembaga multilateral yang matang, ASEAN tentu harus mempertimbangkan kondisi ini untuk menentukan sikap dan menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan. Keputusan ASEAN untuk netral, merapat ke salah satu pihak, atau mengokohkan diri sebagai badan *collective security* yang kuat tentu akan menarik untuk dibahas. Konflik LCS diprediksi tidak akan beralih ke perang terbuka dalam beberapa dekade ke depan (Dobbins et al., 2017), namun langkah antisipasi harus tetap disiapkan.

2.1.5 Kepemimpinan Regional

Untuk mencapai kondisi yang 'aman', para pemimpin ASEAN harus memiliki *regional leadership* yang ideal untuk merespons setiap pergerakan geopolitik di LCS. *Regional Leadership* adalah terminologi yang kurang populer jika harus disandingkan dengan kepemimpinan formal. Menurut Normann (2013: 25), perbedaan terletak pada daya ikat pada aturan. Kepemimpinan formal menghendaki setiap anggota untuk mematuhi setiap keputusan yang sudah disepakati oleh semua pihak, sedangkan kepemimpinan regional hanya mempromosikan kegiatan atau mengarahkan aturan untuk mencapai tujuan kolektif. Kepemimpinan itu

tidak mengenal hierarki, artinya posisi mereka setara, horizontal atau heterarki (Miura, 2007).

Bennet (2003) menjelaskan jika *regional leadership* bisa disepadankan dengan *distributed leadership* yang terdiri dari tiga elemen yang khas. *Pertama*, kepemimpinan terdistribusi menyoroti kepemimpinan sebagai properti yang muncul dari kelompok atau jaringan individu yang berinteraksi. *Kedua*, kepemimpinan ini menunjukkan keterbukaan terhadap batas-batas kepemimpinan. *Ketiga*, hal-hal seperti perspektif atau keahlian tersebar secara tidak merata diantara semua anggotanya. Hal ini mendorong dinamika kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama.

Kepemimpinan regional sangat diperlukan untuk meminimalisir konflik yang muncul di kawasan. Senada dengan ini pernyataan dari teori transisis kekuatan bahwa jika distribusi kekuatan seimbang, maka pihak yang bertikai memiliki peluang kemenangan yang sama dan ketidakpastian itu lebih memungkinkan kerjasama (Fleme et.al, 2010: 44). Semakin tidak merata distribusi kekuasaan di suatu wilayah, maka semakin besar bagian kekuasaan yang dipegang oleh negara terkuat di regional tersebut.

Menurut Frazier & Stewart-ingersoll (2010: 734), pemimpin regional setidaknya harus memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:

- a. negara ini adalah kandidat yang paling mungkin memiliki minat dan kemampuan untuk melibatkan diri secara luas dalam pengembangan tatanan keamanan di wilayah mereka;
- b. kemampuan tidak menentukan *security order*, jadi apa yang dilakukan oleh kekuatan regional harus memiliki implikasi substantif bagi lingkungan keamanan di wilayah mereka.

Kekuatan regional mampu mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan tetangga mereka di kawasan, dan menjembatani kawasan dengan sistem global.

Douglas Lemke dalam (Fleme et.al, 2010) mengatakan bahwa *regional power* harus dilengkapi dengan kemampuan dalam dimensi

militer, demografis, dan ekonomi. Dimensi militer mencakup jumlah personel militer dan pengeluaran militer setiap negara bagian. Dimensi demografis melibatkan populasi nasional dan subset dari populasi nasional yang tinggal di kota. Dimensi ekonomi diwakili oleh produksi besi/baja dan konsumsi energi.

2.1.6 Good Maritime Governance

Teori mengenai *good maritime governance* berguna untuk menakar tata kelola maritim di Indonesia sebagai kandidat *regional leader* di kawasan. Tata kelola maritim adalah seperangkat fungsi yang dibentuk oleh program jangka panjang dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membiayainya (Shemella, 2016: 89). Tata pemerintahan yang baik, pada kenyataannya adalah praktik untuk membuat segala sesuatunya menjadi rutin. Namun, bahkan rutinitas membutuhkan lembaga maritim yang kuat untuk menerjemahkan niat baik menjadi deretan program yang sukses. Menciptakan institusi yang tepat, serta proses yang memungkinkan mereka untuk bertindak bersama adalah dasar dari tata kelola maritim.

Lebih lanjut, Shemella dalam penelitiannya mengenai “*Assesing Maritime Governance*”, menjelaskan jika tata kelola maritim yang baik harus melalui pengujian level I (MDA, *Maritime Safety, Traditional Maritime Security, Enforcement of Customs and Maritime Law, Protection of Natural Resources (EEZ Enforcement), Maritime Search and Rescue, Disaster Response*, dan *Port Operations and Security*) serta pengujian level II (pada *maritime mision, maritime agency organization, maritime law and policy, diplomatic and foreign affairs support*). Pengujian tahap I dan II dalam tata Kelola maritim bisa dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Maritime Governance Assessment: Level One

<i>Maritime area of focus</i>	<i>Score 1–10 (10) = high level of capacity</i>
<i>Maritime Domain Awareness:</i> Patrols, monitoring, maritime intelligence gathering and fusion, interagency information sharing	
<i>Maritime Safety:</i> Inspection, maritime safety laws, boating safety regulations, maritime safety education	
<i>Traditional Maritime Security:</i> Military training and readiness, number/type/condition of tactical assets, interoperability with maritime partner agencies, coordination with neighboring countries/global maritime forums	
<i>Enforcement of Customs and Maritime Law:</i> National maritime laws and regulations, tactical equipment and assets, law enforcement training, interdiction capability and seizure rates	
<i>Protection of Natural Resources (EEZ Enforcement):</i> Fisheries-related training, drafting and enforcement of resource protec- tion laws, fisheries law-enforcement assets and officers, international agreements, participation in international treaties and forums	
<i>Maritime Search and Rescue:</i> Search and rescue (SAR) capability, SAR assets, SAR training, SAR communications (C3), participation in international agreements and forums	
<i>Disaster Response:</i> Environmental disaster prevention, response training and exercises, pre-staging of response equipment, mitigation, interagency/ international coordination	
<i>Port Operations and Security:</i> Effectiveness of port authority agencies, maintenance/condition of facilities, security of facilities, participation in international agreements/treaties and forums	
Total	

SOURCE: Copyright 2015, Brad Sultzer, used by permission.

Tabel 2.2 Level Two: Functions and subfunctions

Fuctions	Maritime Governance	Maritime Civil and Criminal Authority	Maritime Defence	Maritime Safety	Maritime Response and Recovery	Maritime Economy
Sub-functions	<ul style="list-style-type: none"> ○ Misi maritim ○ Organisasi Badan Maritim ○ Hukum dan kebijakan maritim ○ Dukungan diplomatik dan luar negeri ○ Program maritim ○ Profesional maritim ○ Penjangkauan badan maritim dan koordinasi pemangku kepentingan ○ Akuntabilitas dan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penegakan hukum perdata dan pidana ○ Pengelolaan perbatasan terpadu ○ Dukungan sektor peradilan ○ Keamanan pelabuhan ○ Keamanan kapal ○ Keamanan rantai pasokan ○ Penegakan lingkungan maritim 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Administrasi pertahanan laut ○ Pasukan pertahanan maritim ○ Kesadaran situasi maritim dan kesadaran dan pengawasan domain maritim 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Administrasi keselamatan laut ○ Kontrol status bendera ○ Penangkapan ikan dan keselamatan kapal kecil dan manajemen operasi ○ Manajemen keselamatan laut ○ Administrasi perizinan pelaut ○ Bantuan untuk infrastruktur navigasi, peralatan, dan pemeliharaan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Administrasi tanggap darurat ○ Manajemen insiden ○ Cari dan selamatkan ○ Api ○ Lingkungan ○ Bantuan pertahanan maritim untuk otoritas sipil ○ Investigasi dan analisis setelah tindakan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengaturan dan pengelolaan kegiatan ekonomi ○ Pelabuhan komersial ○ Transportasi ○ Kondisi pasar

source: Maritime Security Sector Reform Guide, USAID, September 2010.

Tabel 2.3 Level Two: Approach and Delivery Indicators and Definitions

Rentang kualitatif	Rentang kuantitatif	Definisi indikator pendekatan	Definisi indikator penyampaian	Komentar dan Catatan
<i>Normal</i>	0-2	Beberapa aktivitas mungkin ada untuk membuktikan kemampuan yang diukur, tetapi aktivitas tersebut bukan bagian dari rencana, kebijakan, proses, atau program formal.	Kemampuan jarang digunakan (0–30% dari waktu) dan kontribusinya terhadap hasil positif minimal.	Mengakui adanya beberapa upaya atau kegiatan, meskipun mungkin tidak berasal dari rencana, kebijakan, atau program yang diformalkan. Juga mengakui upaya yang tersebar atau terputus (seringkali di tingkat individu atau lokal).
<i>Modest</i>	3-5	Terorganisir, jika mendasar, pendekatan terhadap kemampuan ada, dan ada upaya untuk mengatasi kelemahan.	Kemampuan tidak digunakan secara konsisten (30–60% dari waktu) dan hasilnya tidak menentu atau tidak dapat diprediksi.	Mengakui bahwa mungkin tidak ada konsistensi upaya tetapi ada berbagai tingkat organisasi.
<i>Moderat</i>	6-8	Penyelenggaraan kegiatan yang mendukung kemampuan tersebut bersifat profesional, terformalisasi, dan didukung oleh tingkat anggaran yang memadai.	Kemampuan sebagian besar digunakan (60-90% dari waktu) dan menghasilkan hasil yang memadai.	Menunjukkan kecanggihan dan organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Bahkan jika kemampuan tidak digunakan secara konsisten atau tidak ada di seluruh domain maritim, hasilnya memadai.
<i>Significant</i>	9-10	Kegiatan diformalkan, direncanakan, didanai, dinilai, dan disesuaikan secara terus-menerus, yang menunjukkan tingkat kemampuan yang signifikan di bidang ini.	Kemampuan digunakan secara konsisten (90% dari waktu atau lebih tinggi) dan menghasilkan hasil yang efektif dan efisien. Kajian kapabilitas memastikan kapabilitas ditingkatkan jika/ketika keadaan mengharuskan.	Kapasitas yang lebih kuat ada dan sedang dipertahankan. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas di seluruh domain maritim.

source: Maritime Security Sector Reform Guide, USAID, September 2010.

Tata kelola maritim juga berhubungan dengan *ocean governance* dan *ocean governance initiatives* (Gupta, 2010:32) berupa merumuskan aksi jangka panjang yang dibentuk secara regional, melaksanakan manajemen adaptif, pendekatan dengan integrasi dan organisasi, mempromosikan partisipasi dan budaya kolaborasi, menciptakan forum bagi negara-negara pantai, mengembangkan pemahaman multidisiplin tentang pengetahuan laut, melakukan *Strategic Impact Assessment* (SIA), hingga menyediakan pusat kajian informasi dan teknologi kawasan.

Dalam hal ini, multilateralisme bisa digunakan untuk membangun tata kelola maritim yang baik di kawasan. Multilateralisme menitikberatkan terjadinya kerjasama sebagai suatu media oleh negara-negara dalam menyesuaikan kebijakannya dengan mempertimbangkan preferensi dari negara lain. Multilateralisme merupakan ideologi yang dirancang untuk menyuguhkan kegiatan kerjasama dengan melibatkan negara baik secara universal atau dalam beberapa grup yang relevan (Caporaso, 1992).

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini, peneliti akan menganalisis tema maupun permasalahan sejenis yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang sedang dilakukan. Proses *review* akan memberikan gambaran, acuan, referensi, dan informasi tambahan untuk menemukan *gap* antara *das sein* dan *das sollen* mengenai arsitektur keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan.

2.2.1 David C. Gompert, Astrid Stuth Cevallos, dan Cristina L. Garafola (2017)

Dalam penelitiannya mengenai "*War with RRC: Thinking Through the Unthinkable*", Gompert dkk. berpendapat jika perang terencana antara Amerika Serikat dan RRC diprediksi 'sangat tidak mungkin' terjadi. Namun bahaya dari krisis yang salah penanganan bisa memicu permusuhan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Analisis ini menjelaskan berbagai jalan

yang bisa ditempuh *War with RRC* dan beberapa kemungkinan dari konsekuensi yang sudah diambil. Penelitian ini akan menyokong tesis dari sisi informasi mengenai gambaran situasi yang akan terjadi jika perang terjadi dalam intensitas yang besar dan cepat, intensitas kecil dan lama, intensitas besar dan lama, serta intensitas kecil dan cepat. Pemetaan yang dilakukan oleh Gompert memiliki kesamaan pola dengan skema *game theory*, karena menawarkan berbagai kemungkinan alasan dan situasi konflik.

2.2.2 Chistian Bueger (2019)

Tahun 2019, Bueger mengadakan penelitian mengenai “*What is the right security architecture for the Western Indian Ocean?*”, dalam analisisnya dia mengatakan jika kawasan Samudera Hindia Barat memiliki potensi yang strategis dan membutuhkan arsitektur keamanan yang tepat. Bueger memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam penyusunan tesis ini, konsep yang dia gagas mengenai arsitektur keamanan maritim akan diaplikasikan oleh penulis di kasus LCS. Bueger mengusulkan jika arsitektur keamanan maritim harus didasarkan pada tiga dimensi penting, yakni *knowing, governing, and policing the sea*.

Knowing the sea berarti mengembangkan pemahaman bersama mengenai situasi di laut. *Governing the sea* menyiratkan dialog politik yang bertujuan untuk menemukan konsensus di antara perbedaan, memastikan komitmen politik untuk menangani keamanan maritim di kawasan, tetapi juga menjaga kekuatan besar agar tetap terkendali. Sedangkan *policing the sea* merujuk pada proses perencanaan operasi penegakan hukum bersama yang akan dipimpin oleh *regional leader*.

2.2.3 Chu Hao and Chen Qinghong (2016)

Dalam penelitiannya mengenai “*Maritime Security Cooperation in the South RRC Sea*”, Chu Hao dan Chen Qinghong menunjukkan bahwa sengketa LCS telah menarik perhatian banyak negara di dunia dalam

beberapa tahun terakhir. Beberapa penggugat saling tunjuk dan menyalahkan, karena melanggar Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DOC). Penelitian ini sangat mendukung tesis ini karena menyinggung beberapa tantangan keamanan di Laut Cina Selatan yang memberikan konsekuensi serius bagi stabilitas dan ketertiban di wilayah laut Asia Timur. Penelitian ini membahas tentang kerjasama keamanan maritim di kawasan dan memberikan saran tentang solusi untuk meningkatkan kerja sama dan memelihara ketertiban di kawasan.

2.2.4 Andrea Eline Ringstad Eliassen (2013)

Dalam penelitiannya mengenai "*Maritime Strategy in Disputed Waters: A game-theoretic analysis of Chinese maritime strategy in the Senkaku/Diaoyu Islands dispute in the period 2010 to 2013*", Eliassen mengatakan bahwa strategi maritim China dicirikan dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi dan militer mereka yang lebih besar dibandingkan dengan Jepang. Melalui penelitian ini, kita mendapat gambaran bahwa China cenderung untuk menggunakan strategi sub-ambang seperti taktik salami atau penggunaan perantara untuk menantang Status Quo dan memberi pelajaran kepada lawannya. China juga mengikuti pola pikir Go melalui strategi sub-ambang mereka; untuk menghasut musuh mereka ke ambang konflik. Dalam pergerakannya, RRC akan mengusahakan upaya untuk mendapatkan lebih banyak wilayah tanpa pertempuran, dan mempertahankan "wajah" mereka di wilayah tersebut. Penelitian ini sangat berguna untuk memahami strategi RRC dalam pertempuran politik melawan Amerika.

2.2.5 Christian Bueger (2015)

Melalui penelitiannya mengenai "*From Dusk to Dawn? MDA in Southeast Asia*", Bueger menjelaskan jika MDA regional harus diatur untuk mengantisipasi ketidakamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Konsep MDA sering kali mendapat citra buruk, dan telah dipahami baik

sebagai proyek hegemoni Amerika atau sebagai proyek teknologi totaliter Aldous Huxleystyle. Penelitian Bueger sangat menyokong penyusunan tesis ini karena membahas mengenai potensi MDA untuk menyatukan para aktor di kawasan, mencapai *collective security*, dan mewujudkan stabilitas keamanan. Bueger mendokumentasikan sistem MDA yang positif, terdesentralisasi, dan kolaboratif. Penelitian ini akan bermanfaat untuk membuat gambaran mengenai MSA di kawasan.

Untuk memudahkan pembaca, peneliti telah membuat ringkasan singkat mengenai berbagai judul yang sudah ditentukan sebagai penelitian terdahulu. Penelitian ini akan digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses penyusunan tesis ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Teori, Konsep, dan Metodologi	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
1	Gompert et al., (2017) Judul: <i>War with RRC</i>	Teori/Konsep: 1. Teori perang 2. Game Theory Approach (<i>war by Tabel</i>) Metodologi: Mixed Method	Perang RRC-Amerika akan menghasilkan dampak yang besar pada bidang militer, ekonomi, politik, dan hubungan internasional di kawasan. Keduanya memiliki kapasitas untuk melakukan perang terbuka secara cepat, namun akan sama-sama sangsi jika internsitasnya parah. Keadaan dan pengambilan keputusan kemudian disampaikan dalam <i>war by Tabel</i> .	Penggunaan <i>game theory approach</i> untuk menganalisis situasi konflik.	Penelitian ini lebih menekankan pada rivalitas Amerika dan RRC secara independen.
2	Bueger (2019) Judul: <i>What is the right security architecture for the Western Indian Ocean</i>	Teori/Konsep: 1. Arsitektur Keamanan Maritim 2. MDA 3. Stabilitas Kawasan	Bueger mengusulkan jika arsitektur keamanan maritim harus didasarkan pada tiga dimensi penting, yakni <i>knowing the sea</i> (termasuk penggunaan laut), <i>governing the sea</i> (tata kelola maritim), dan <i>policing the sea</i> .	Pembahasan konsep arsitektur keamanan maritim	Tesis ini dan Bueger membahas lokus wilayah yang berbeda

No	Nama, Tahun dan Judul	Teori, Konsep, dan Metodologi	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
		Metodologi: Mixed Method			
3	Chu Hao and Chen Qinghon (2016) Judul: <i>Maritime Security Cooperation in the South China Sea</i>	Teori/Konsep: 1. Maritime Security 2. National Threats 3. Global Cooperation Metodologi: Kualitatif	Situasi di Laut Cina Selatan pernah stabil setelah Declaration on Conduct of Parties in the South RRC Sea (DOC) ditandatangani pada tahun 2002. Namun dalam beberapa tahun terakhir, keamanan di Laut Cina Selatan telah menimbulkan beberapa tantangan. Tiga faktor yang meningkatkan risiko konfrontasi di Laut Cina Selatan adalah peningkatan tindakan sepihak, modernisasi militer, dan peningkatan cepat Penjaga Pantai di wilayah tersebut.	Topik pembahasan akan relevan untuk memetakan perspektif konflik dari sudut pandang ASEAN.	Pembahasan hanya fokus ke DOC, dalam tesis ini peneliti akan menyertakan COC sebagai instrument kerjasama yang baru.
4	Andrea Eline Ringstad Eliassen (2013) Judul: <i>Maritime Strategy in</i>	Teori/Konsep: 1. Maritime Dispute 2. Conflict Management 3. Salami Tactics	Melalui penelitian ini, kita mendapat gambaran bahwa China cenderung untuk menggunakan strategi sub-ambang seperti taktik salami atau penggunaan perantara untuk menantang Status Quo dan memberi ultimatum atau pelajaran	Penggunaan <i>game theory</i> jenis dilema tahanan, <i>bluff game</i> , dan <i>easy win game</i> .	Perbedaan lokus, dalam penelitian ini penulis fokus kepada isu sengketa Jepang dan RRC mengenai

No	Nama, Tahun dan Judul	Teori, Konsep, dan Metodologi	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
	<i>Disputed Waters: A game-theoretic analysis of Chinese maritime strategy in the Senkaku/Diaoyu Islands dispute in the period 2010 to 2013</i>	4. Sub-Treshold Metodologi: Kualitatif	kepada lawannya. China juga mengikuti pola pikir Go melalui strategi sub-ambang mereka; untuk menghasut musuh mereka ke ambang konflik. Dalam pergerakannya, RRC akan mengusahakan upaya untuk mendapatkan lebih banyak wilayah tanpa pertempuran, dan mempertahankan "wajah" mereka di wilayah tersebut. Penelitian ini sangat berguna untuk memahami strategi RRC dalam pertempuran politik melawan Amerika.		kepulauan Senkaku.
5	Bueger (2015a) Judul: <i>From Dusk to Dawn? Maritime Domain Awareness in Southeast Asia</i>	Teori/Konsep: 1. Maritime Security 2. Maritime Domain Awareness Metodologi: Kualitatif	MDA regional harus diatur untuk mengantisipasi ketidakamanan maritime di kawasan. Konsep MDA sering kali mendapat citra buruk, telah dipahami baik sebagai proyek hegemoni Amerika atau sebagai proyek teknologi totaliter Aldous Huxleystyle. Padahal MDA berpotensi menyatukan para aktor. Sistem Asia Tenggara	Sebagai salah satu tujuan pembentukan MSA, pembahasan mengenai MDA di kawasan menjadi topik yang sangat berkaitan dengan pembahasan ini.	MDA adalah gabungan dari MSA dan kerangka nasional (hukum). Pada tesis ini peneliti hanya akan membahas tentang MSA di kawasan, jadi

No	Nama, Tahun dan Judul	Teori, Konsep, dan Metodologi	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
			mendokumentasikan efek positif yang dapat dimiliki oleh sistem MDA terdesentralisasi dalam memastikan kolaborasi lintas sipil-militer, industri negara dan antar negara bagian.		tidak menyertakan bahasan yang mendalam mengenai MDA.

Sumber: Gompert et al. (2017); Bueger (2019); Bekkevold & Till (2016); Eliassen (2013); dan Bueger (2015)

2.3 Kerangka Pemikiran

Sengketa yang terjadi di LCS telah menimbulkan pergolakan ancaman di kawasan, konflik ini diprediksi akan memberi konsekuensi yang serius bagi stabilitas dan ketertiban di laut Asia Timur (Chu Hao and Chen Qinghong, 2016: 221). Klaim sepihak RRC terhadap *nine dash line* hanya satu dari sekian langkah RRC untuk memaksakan hukum dari pihaknya sendiri (*RRC's Lawfare*). RRC juga berusaha untuk menggunakan instrumen kekuatan maritim dari militer (PLA) dan sipil (CCG, RRC's Militia dan para pedagang) untuk memaksa pihak lain melakukan kehendaknya di domain maritim yang sudah direncanakan (Holmes & Yoshihara, 2017).

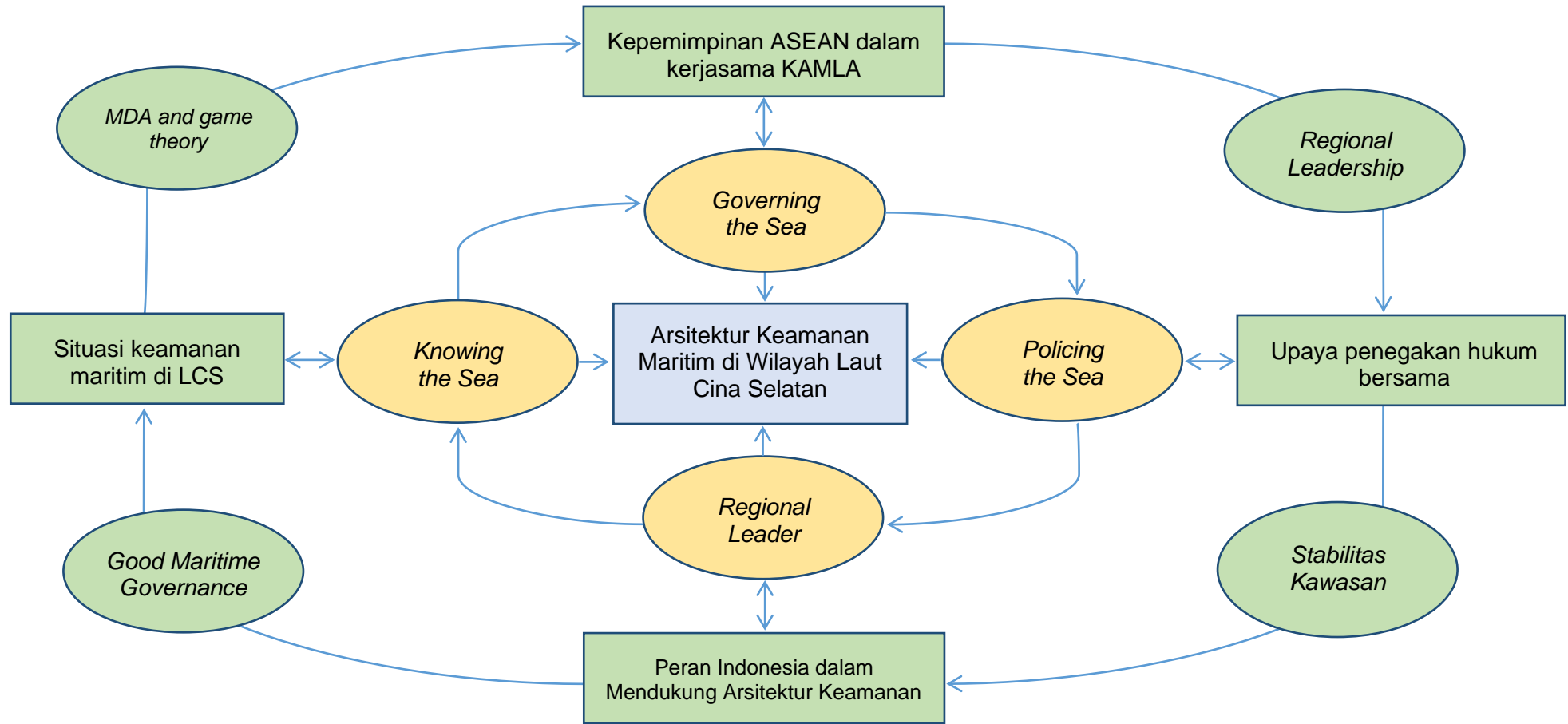
Dengan mengidentifikasi Laut Cina Selatan sebagai wilayah sengketa atau mandala pertempuran di kawasan Indo-Pasifik, kita sudah sepatutnya menganalisis solusi guna memelihara stabilitas keamanan maritim di kawasan tersebut. Secara umum, penelitian ini akan mengkaji arsitektur ideal yang harus dibangun untuk memperkuat keamanan maritim di LCS. Arsitektur bisa dilihat dari tiga variabel kunci, yakni *knowing the sea* untuk mengetahui situasi saat ini di LCS, *governing the sea* untuk mengkaji *regional leadership* ASEAN untuk mendorong kerjasama keamanan maritim di kawasan, serta *poliicing the sea* yang membahas operasi penegakan hukum bersama. Ketiga variabel tersebut saling terkait dan tidak berdiri secara independen.

Peneliti juga mengkaji peran Indonesia sebagai *regional leader* untuk mendukung pembentukan arsitektur keamanan maritim di LCS. Pada prosesnya, situasi faktual akan disandingkan dengan kondisi ideal untuk menemukan *gap* penelitian dan mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dikaji. Konsep dan teori yang diusung berguna untuk merefleksi dan menjelaskan perilaku para aktor berdasarkan sudut pandang akademis. Sebagai pertimbangan, para pihak yang terlibat bisa menyusun kebijakan dan strateginya berdasarkan analisis konflik dan pengembangan MDA. Keduanya sangat berguna untuk proses *knowing*

the sea. Kedua instrumen ini akan berguna sebagai bekal untuk meredakan konflik multilateral yang terjadi disana.

Proses penyelesaian konflik dalam tesis ini sebagian besar akan ditinjau berdasarkan perspektif ASEAN sebagai kekuatan regional. Untuk mencegah dampak yang lebih besar, *regional leadership* dari ASEAN harus dihadirkan guna menyokong stabilitas keamanan di kawasan. Dalam hal ini, Indonesia berperan sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menjadi *regional leader* yang memimpin proses resolusi konflik dan pembentukan arsitektur di LCS. Untuk memahami narasi ini, perhatikanlah bagan berikut ini.

“ARSITEKTUR KEAMANAN MARITIM DI WILAYAH LAUT CINA SELATAN GUNA MENGURANGI POTENSI KONFLIK”



Bagan 3.1 Kerangka Pemikiran